

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG
MILIK NEGARA UNIT ORGANISASI ESELON II TAHUN ANGGARAN 2020
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pembaruan daftar Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Organisasi Eselon II, sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap daftar Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran 2020 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran 2020 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN
BARANG MILIK NEGARA UNIT ORGANISASI ESELON II
TAHUN ANGGARAN 2020 DI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran 2020 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2020

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
5. PPK Biro Umum dan Keuangan;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG KOORDINATOR PENGELOLAAN
DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
NEGARA UNIT ORGANISASI ESELON II
TAHUN ANGGARAN 2020 DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 8 TAHUN 2020

TANGGAL : 8 Mei 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN

KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
UNIT ORGANISASI ESELON II TAHUN ANGGARAN 2020
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi Eselon II
1	Penanggung Jawab	Hermawan	Biro Umum dan Keuangan
2	Ketua	Erlangga Aninditya	Biro Umum dan Keuangan
3	Sekretaris	Angga Sanjaya Lingga	Biro Umum dan Keuangan
4	Anggota	1. Deddy Andrianto	Biro Umum dan Keuangan
		2. Andi Setya Nugraha	Biro Umum dan Keuangan
		3. Mia Diana Putri S	Biro Umum dan Keuangan
		4. Chyntia Felicia Manda Yemima S.	Biro Umum dan Keuangan
		5. Muhammad Irsyan Halomoan	Biro Umum dan Keuangan
		6. Rati Karimah	Biro Umum dan Keuangan
		7. Nur Hartoyo	Biro Umum dan Keuangan
		8. Adi Irawan	Biro Umum dan Keuangan

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi Eselon II
		9. Fitriainingsih	Biro Umum dan Keuangan
		10. Yan Ariwibowo	Biro Umum dan Keuangan
		11. Ribut Aji Kasmiadi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata laksana
		12. Benny Leopold Dumais	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
		13. Andi Ranualdi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		14. Rinatri Rahmawati	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
		15. Muhammad Hanif Firnanda	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		16. Iswan Huntoyungo	Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
		17. Sri Utaminingsih	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
		18. Doddy Pascal	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		19. Muhammad Darwis Rambe	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		20. Rakhma Kusuma Wardhani	Direktorat Sertifikasi Profesi
		21. Lutfi Prafidya Ferisa	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		22. Wuri Setianingrum	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		23. Tinta Nurvitania	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
		24. Rinaldy Prihandoko	Inspektorat

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi Eselon II
		25. Ahmad Khairunnas	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA